

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total (pertumbuhan ekonomi) di suatu negara dengan memperhitungkan adanya pertambahan jumlah penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara-negara berkembang atau *less-developed countries* (LDC) seringkali terbentur oleh ketersediaan anggaran yang terbatas. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama bagi negara-negara tersebut untuk melaksanakan pembangunannya. Mengingat besar kecilnya jumlah anggaran yang ada

---

<sup>22</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 77

sangat penting dalam tahap pelaksanaan pembangunan ekonomi. Umumnya negara berkembang memiliki tingkat pendapatan dan tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah tersebut tentu akan berdampak terhadap rendahnya anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dengan terbatasnya anggaran yang ada, maka harus seoptimal mungkin dalam mengelola dan menggunakan anggaran yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat tercapai.

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara. Anggaran pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membangun dan memelihara berbagai macam infrastruktur seperti jalan raya, bandara maupun yang lainnya. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menarik investasi. Pemerintah juga dapat menggunakan anggarannya untuk mendukung sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi, seperti pertanian, industri maupun pariwisata. Selain itu, dalam situasi krisis atau resesi pemerintah dapat menggunakan anggarannya untuk mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian.

Guna mempercepat program pembangunan ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang

No 32 tahun 2004.<sup>3</sup> Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah berhak mengelola sendiri keuangannya termasuk menentukan dan menyusun sendiri anggaran yang akan di gunakan untuk kepentingan pemerintahanya.<sup>4</sup>

Adanya otonomi daerah menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi Jawa Timur untuk menyusun, menyelenggarakan dan mengurus sendiri anggaran pengeluaranya untuk membangun daerahnya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan demi tercapainya pembangunan ekonomi. Pada tahun 2022, pengeluaran pemerintah Jawa Timur sebesar Rp. 31.502.859.030.720 dan menempati urutan ke-7 provinsi dengan pengeluaran pemerintah terbesar di Indonesia. Berikut adalah data pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2022.

---

<sup>3</sup> Rusera Ricko Yunanto, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klaten Tahun 1990-2012, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 1.

<sup>4</sup> Sahya Anggara, Administrasi Keuangan Negara, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hal. 215-216

**Grafik 1.1**  
**Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2000-2022 (miliar)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Berdasarkan pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2000 hingga tahun 2022 hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2020 dan tahun 2022 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tentunya dalam menetapkan besarnya jumlah anggaran yang akan digunakan atau dikeluarkan dalam setiap tahunnya, pemerintah Jawa Timur harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini berarti besarnya jumlah pengeluaran pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor atau kondisi yang sedang dihadapi. Baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang diduga dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya yaitu besaran nilai upah minimum provinsi, gini ratio atau ketimpangan distribusi pendapatan dan juga inflasi.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan menjadi masalah di setiap provinsi tidak terkecuali provinsi Jawa Timur yaitu besaran nilai upah minimum provinsi. Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.<sup>5</sup> Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang sering kali diterapkan di berbagai negara yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, upah minimum adalah alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan supaya nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sisi kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.<sup>6</sup>

Upah minimum provinsi merupakan komponen dari pendapatan masyarakat yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh akan memberikan dampak yang semakin tinggi pada pengeluaran konsumsi masyarakat. Keynes menyatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga

---

<sup>5</sup> Hadi Stiawan, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi DKI Jakarta", Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 hlm. 68

<sup>6</sup> Desy Meilasari, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016", Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 170

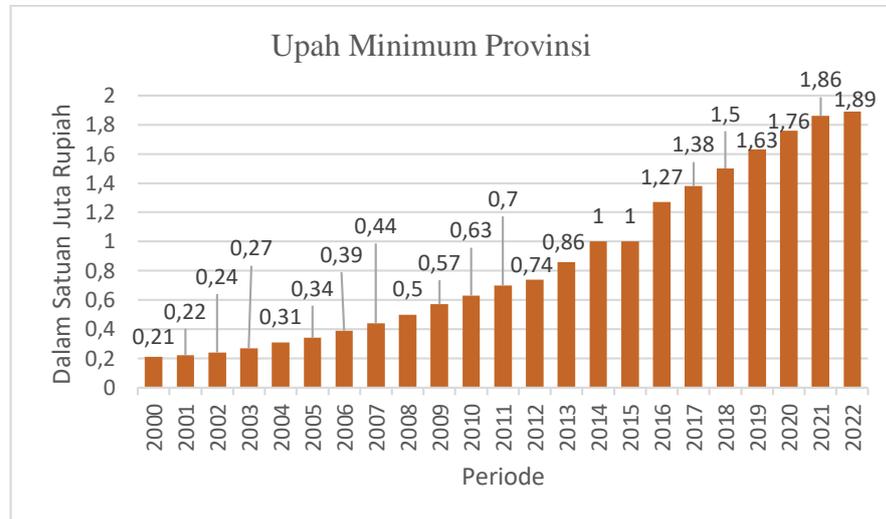
dengan meningkatnya besaran upah minimum provinsi, maka dapat mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.

Pajak penghasilan akan lebih tinggi ketika upah minimum naik. Pekerja dengan pendapatan rendah akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Ini berarti para pekerja akan membayar lebih banyak pajak penghasilan kepada pemerintah. Sehingga dengan pendapatan yang meningkat, maka anggaran pengeluaran yang akan digunakan pemerintah juga akan meningkat. Sehingga meningkatnya besaran nilai upah minimum provinsi secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap jumlah pengeluaran pemerintah yang akan digunakan.<sup>7</sup> Berikut ini adalah data perkembangan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur, pada periode tahun 2000-2022:

---

<sup>7</sup> Sukirno Sadono, Makro Ekonomi Modern: Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

**Grafik 1.2**  
**Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Dari grafik 1.2 dapat dilihat bahwa besaran nilai upah minimum provinsi Jawa Timur setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, walaupun besarnya berbeda-beda. Peningkatan jumlah UMP dapat dilihat dari meningkatnya jumlah besaran yang awalnya di tahun 2000 sebesar Rp. 214.000 sehingga naik secara terus-menerus yang pada akhirnya di tahun 2022 menjadi Rp. 1.891.567.

Selain upah minimum provinsi, faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu gini ratio atau ketimpangan distribusi pendapatan. Gini ratio merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di suatu daerah. Nilai gini rasio berkisar antara nol dan satu. Apabila nilai mendekati nol atau sama dengan nol maka ketimpangan

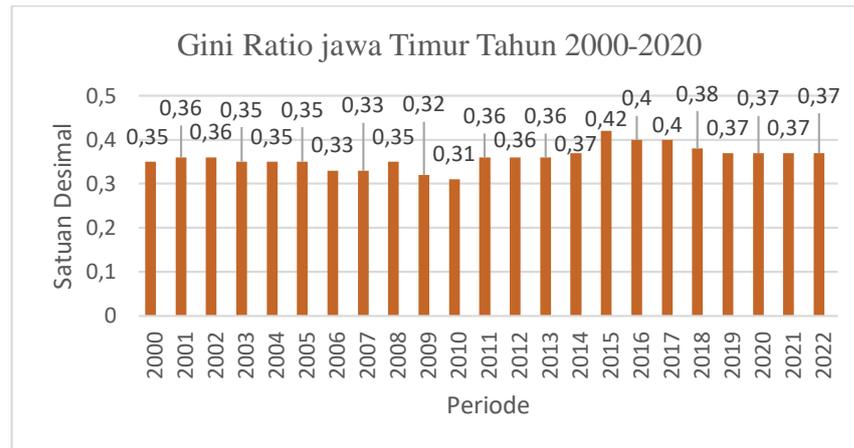
rendah atau pemerataan sempurna. Dan apabila gini ratio mendekati angka satu maka ketimpangan tinggi atau pemerataan tidak sempurna.

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi masalah yang harus segera ditindaklanjuti. Jika tingkat ketimpangan semakin meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Ketika kemiskinan meningkat, pengeluaran pemerintah cenderung akan ikut meningkat karena pemerintah perlu mengimplementasikan atau memperluas program-program sosial dan bantuan ekonomi untuk mendukung individu atau keluarga yang terdampak kemiskinan. Seperti bantuan makanan, subsidi bahan bakar, program pendidikan, pelatihan kerja maupun bantuan langsung tunai. Tujuan dari peningkatan pengeluaran ini tentunya guna mengurangi dampak negatif kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan sehingga mendorong pemulihan ekonomi.

Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam situasi ini juga didasarkan pada teori dari Adam Smith yang menyarankan bahwa dalam masa-masa ekonomi yang sulit yang disebabkan tingginya ketimpangan pendapatan pemerintah harus menjalankan fungsi distribusinya. Yaitu fungsi pemerintah untuk menyesuaikan pembagian atau distribusi pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Apabila fungsi tersebut dijaga dan dijalankan maka sistem perekonomian terkendali sehingga tidak menyebabkan eksternalitas yang dapat merugikan keseimbangan ekonomi yang dapat menyebabkan ketimpangan perekonomian di suatu wilayah atau

daerah.<sup>8</sup> Berikut ini adalah data gini ratio Provinsi Jawa Timur, pada periode tahun 2000-2022:

**Grafik 1.3**  
**Gini Ratio Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Berdasarkan pada grafik 1.3 dapat di lihat bahwa gini ratio di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2000 sampai 2022 berfluktuatif tetapi masih di bawah angka 0,5. Hal itu berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan bisa dibilang cukup rendah. Pada tahun 2000 hingga tahun 2014, gini ratio stabil diangka 0,3. Namun pada tahun 2015, naik diangka 0,4. Namun, setelah itu terus mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020 sampai 2022 stabil pada angka 0,37.

Selanjutnya, faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi jumlah pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan

<sup>8</sup> Guritno, Mangkosobroto, Ekonomi Publik Edisi Ketiga, Yogyakarta:BPFE UGM, 2001

oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.<sup>9</sup>

Menurut teori inflasi biaya atau *cost-push inflation theory*. Teori ini menyatakan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kelebihan permintaan (*excess demand*), tapi juga disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah maupun pajak. Ketika biaya produksi meningkat maka produsen akan menaikkan harga jual barang untuk mempertahankan margin kerugian. Hal ini dapat memicu kenaikan secara umum baik barang maupun jasa di seluruh perekonomian.<sup>10</sup>

Dengan begitu, ketika tingkat inflasi terus meningkat maka akan menyebabkan harga barang dan jasa yang akan dibeli dan digunakan pemerintah seperti bahan bakar, peralatan kantor, konstruksi infrastruktur akan menjadi lebih mahal. Ini berarti pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang yang berarti meningkatkan pengeluarannya untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan. Berikut ini adalah data tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur, pada periode tahun 2000-2022:

---

<sup>9</sup> Manurung, Naf'an. Tinjauan ekonomi syariah (ekonomi makro). Edisi ketiga. (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2008)

<sup>10</sup> Mankiv, N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson, *Macroeconomics*, New York: Worth Publishers. Hal. 391

**Grafik 1.4****Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Berdasarkan pada grafik 1.4 dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2000 sampai 2022 sangat berfluktuatif. Pada tahun 2000 Tingkat inflasi sebesar 10,34 %. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2001, inflasi kembali meningkat, yaitu sebesar 14,13 %. Kemudian pada tahun 2005, tingkat inflasi yaitu sebesar 15,19 % sekaligus menjadi tingkat inflasi tertinggi. Namun pada tahun berikutnya, terus mengalami penurunan secara fluktuatif. Tahun 2022, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 6,52%.

Faktor makro ekonomi yang telah dijelaskan tersebut, sangat penting bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pemerintah. Semua faktor tersebut diduga dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan yang akan dilakukan. Khususnya mengenai jumlah anggaran pemerintah yang akan dikeluarkan guna membiayai kebutuhan rumah tangganya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang **“Pengaruh Upah**

## **Minimum Provinsi, Gini Ratio dan Inflasi Terhadap Pengeluaran Pemerintah Jawa Timur Tahun 2000-2022”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah penelitian supaya penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Terdapat beberapa masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Gini Ratio dan Inflasi Terhadap Pengeluaran Pemerintah Jawa Timur Tahun 2000-2022. Hal tersebut dikarenakan adanya fluktuasi tingkat upah minimum provinsi (ump), gini ratio atau ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi jumlah pengeluaran pemerintah Jawa Timur. Dari faktor tersebut yang diduga mempengaruhi pengeluaran pemerintah Jawa Timur, maka dapat diketahui seberapa maksimal realisasi anggaran pengeluaran pemerintah. Apabila pengeluaran pemerintah sudah terealisasi dengan maksimal maka dapat mendorong pembangunan dan stabilitas perekonomian. Hasil penelitian dilandasi pada teori yang berkaitan dengan data sekunder yang diperoleh dari data pengeluaran pemerintah Jawa Timur tahun 2000-2002, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relevan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2022 ?
2. Apakah gini ratio berpengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2022?
3. Apakah inflasi berpengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh upah minimum provinsi secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2022.
2. Untuk menguji pengaruh gini ratio secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2022.
3. Untuk menguji pengaruh inflasi secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2022.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1. Bagi akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan membantu akademisi dalam memahami bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran, prioritas pengeluaran serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan akademisi dapat mengevaluasi terkait efisiensi dan efektifitas anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

### **2. Bagi Pemerintah Jawa Timur**

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan pengeluaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya bagi badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Jawa Timur selaku lembaga yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan. Sehingga diharapkan kedepanya anggaran yang dikeluarkan dan digunakan dapat optimal bagi pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Timur.

### 3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian atau studi lebih mendalam tentang topik serupa. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan, metodologi maupun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai titik awal untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan atau penyempurnaan teori dan model yang terkait dengan pengeluaran pemerintah. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk memperluas atau memodifikasi teori dan model yang akan digunakan kedepannya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang memiliki hubungan dan pengaruh terhadap jumlah pengeluaran pemerintah yang berjudul, “ Hubungan Upah Minimum Provinsi, Gini Ratio Dan Inflasi Terhadap Pengeluaran Pemerintah Jawa Timur Tahun 2000-2022”. Sehingga fokus penelitian hanya menganalisis tiga faktor yang diduga berpengaruh pada pengeluaran pemerintah. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel bebas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek, serta kontribusi variabel independen (upah

minimum provinsi, gini ratio, inflasi) terhadap variabel dependen (Pengeluaran pemerintah).

## 2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya meliputi terbatasnya waktu yang digunakan. Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan periode selama kurun waktu 23 tahun terakhir tahun 2000-2022.

## G. Penegasan Istilah

Dalam memahami suatu judul penelitian terkadang terdapat pula kesalahan dalam menafsirkan maksud dari peneliti. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari maksud peneliti, berikut akan diuraikan tentang istilah penting dalam penelitian ini.

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan teoritis tentang suatu konsep yang hendak diteliti. Definisi konseptual merupakan definisi yang berasal dari buku atau bahan kajian literatur yang relevan dengan penelitian.

#### a. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran dana atau belanja pemerintah dalam periode tertentu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan guna mewujudkan fungsinya menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang, pembayaran bunga utang dan belanja subsidi serta pengeluaran pembangunan.<sup>11</sup>

b. Upah minimum provinsi

Upah minimum provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Berdasarkan pandangan Karl Marx pengupahan memberikan insentif dalam peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan pendapatan pemerintah (pendapatan nasional).<sup>12</sup> Sistem pengupahan yang intens bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan memotivasi pekerja untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Peningkatan produktifitas kinerja ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pemerintah (pendapatan nasional).

c. Gini ratio

Gini ratio merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di suatu daerah. Nilai gini rasio berkisar antara nol dan satu. Menurut Simon Kuznet, ketika dalam tahap pembangunan

---

<sup>11</sup> Basuki Pujo Alwanto, *Perekonomian Indonesia (Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014 hlm. 174

<sup>12</sup> Sony Sumarsono, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, hal.156

ekonomi ketimpangan meningkat, pemerintah justru mengalami tekanan untuk mengurangi pengeluarannya, terutama pada program redistribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah hanya fokus mengalokasikan pengeluarannya untuk sumberdaya yang terbatas pada sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup>

#### d. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme. Menurut teori inflasi biaya atau *cost-push inflation theory*, menyatakan bahwa inflasi tidak hanya di pengaruhi oleh adanya kelebihan permintaan (*excess demand*), tapi juga disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah maupun pajak. Ketika biaya produksi meningkat maka produsen akan menaikkan harga jual barang untuk mempertahankan margin kerugian. Hal ini dapat memicu kenaikan secara umum baik barang maupun jasa di seluruh perekonomian.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk menjelaskan tentang judul penelitian agar tidak menimbulkan berbagai

---

<sup>13</sup> Kuznet, S, Economic Growth And Income Inequality, The American Economic Review, 1995, hal. 28.

<sup>14</sup> Mankiv, N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson, Macroeconomics, New York: Worth Publishers. Hal. 391

penafsiran yang tidak diinginkan pada penelitian. Secara operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu, upah minimum provinsi, gini ratio dan inflasi terhadap variabel dependen yaitu pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2022.

## H. Sitematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan secara garis besar pada skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi : halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

### 2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terdiri dari VI (enam) bab dan dari masing-masing bab mempunyai subbab. Berikut penjelasannya:

#### BAB I :Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai: (a) latar belakang masalah, (b) indentifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan masalah, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

**BAB II :Landasan Teori**

Dalam bab landasan teoritis ini di dalamnya berisi uraian mengenai: (a) kajian teoritis tentang Pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi, gini ratio dan inflasi, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, (d) hipotesis penelitian.

**BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab metode penelitian ini di dalamnya berisi uraian mengenai: (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) populasi dan sampel penelitian, (c) teknik pengambilan sampel, (d) sumber data, variabel penelitian dan skala pengukurannya, (e) teknik pengumpulan data, (f) instrument penelitian, (g) teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian**

Dalam bab hasil penelitian ini didalamnya berisi mengenai deskripsi wilayah penelitian, deskripsi data dan pengujian hipotesis.

**BAB V : Pembahasan**

Dalam bab pembahasan ini dalamnya berisi mengenai di uraian pembahasan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan mengulas secara teoritik dari hasil penelitian.

## BAB VI : Penutup

Dalam bab penutup ini didalamnya berisi mengenai: (a) kesimpulan dan (b) saran

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari: (a) daftar Pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.